

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PENGRAJIN KAIN
TENUN SUTERA DI DESA KARAMA KECAMATAN TINAMBUNG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



Nomor Induk Mahasiswa : 105611120416

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDYAAN PENGRAJIN KAIN
TENUN SUTERA DI DESA KARAMA KECAMATAN TINAMBUNG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan oleh :

ST.NURAI SYAH

Nomor Stambuk : 10561 1120416

Kepada

10/09/2021
-
1 exp
Sumb. Alumni
-
R/0205/ADN/21CD
NUR
P'

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengrajin
Kain Tenun Sutera Di Desa Karama Kecamatan
Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : ST.Nuraisyah
Nomor Induk Mahasiwa : 105611120416
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr.Muh.Isa Ansyari,M,Si

Pembimbing II



Dr.Haerana,S.Sos.,M.Pd

Mengetahui:

Dekan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727

Ketua Program Studi



Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

NBM:1067463

HALAMAN PENERIMA TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0205/FSP/A.4-II/VII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin 30 Agustus 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

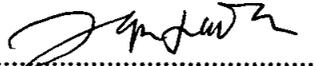

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
2. Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
3. Dr. Haerana, S.Sos,M.Pd


(.....)

(.....)

(.....)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ST.Nuraisyah

Nomor Stambuk Mahasiswa : 105611120416

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2 September 2021

Yang Menyatakan



ST.NURAI SYAH

ABSTRAK

ST.Nuraisyah, Muh. Isa Ansyari, Haerana, Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kain Tenun di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Pemerintah daerah memiliki kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut menjadi landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana berarti penelitian ini menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang nyata. Informan pada penelitian ini sebanyak 7 orang sebagai informan. Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, sajian data dan verifikasi. Teknik pengabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pengrajin Kain Tenun Sutera Di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu gambaran secara objektif terkait keadaan suatu program, dan tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu meneliti suatu kasus pada satu kesatuan sebuah program. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan informan pokok 7 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa indikator berupa Efektivitas dalam unit pelayanan memberikan bantuan berupa tempat penenunan dan alat tenun untuk kelompok masyarakat. Efisien sebab dalam memperoleh bantuan dari pemerintah kabupaten tidak dikenakan biaya. Proses pemberdayaan di Desa Karama masih kurang di tahun ini karena kurangnya dana untuk proses pemberdayaan di karenakan anggaran dari pemerintah di alihkan untuk bantuan masyarakat.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pemberdayaan, Pengrajin Kain

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kain Tenun Sutera di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar”**. Skripsi yang penulis buat bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Satu penghargaan tertinggi penulis berikan pada Ayah **M.Nurdin Kumar** dan Ibu **Mina Saal** tercinta yang dengan ketulusan hati dan segenap pengorbanannya serta kasih sayang kepada penulis serta menjadi tulang-tulang penguat penulis dalam menghadapi begitu banyak hambatan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak masukan, bimbingan dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H.Ambo Asse, M.Ag** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. **Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. **Bapak Nasrul Haq, S.Sos, MPA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. **Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap** selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. **Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M,Si.** selaku Penasehat Akademik selama kuliah di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. **Bapak Dr. Muh. Isa Ansyari, M, Si** selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. **Ibu Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas ilmunya yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan serta seluruh staff pegawai/administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas pelayanannya selama ini.
9. Seluruh keluarga khususnya Kakak tercinta saya Imran Nur, Cheiruddin dan adik saya Heriamsyah, Widia Nurdin yang selama ini selalu mendoakan dan memberikan dukungannya baik materil maupun moril.

10. Kakanda Santi, S.Sos serta teman – temanku Rosita, Ria, Maryam, dan Fitri yang senantiasa memberikan bantuan dan *support*.
11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2016.
12. Serta seluruh orang – orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bantuan, do'a dan motivasinya dinilai ibadah di sisi Allah SWT Aamiin. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Makassar, 2 September 2021


ST.NURAI SYAH

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Pengertian Peran	13
C. Teori Pemberdayaan.....	24
D. Tahapan Pemberdayaan.....	25
E. Produksi.....	28
F. Tenun Sutera Mandar Sulawesi Barat.....	29
G. Kerangka Pikir.....	36
H. Fokus Penelitian	37
I. Deskripsi Fokus Penelitian	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	41
Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia	48
Tabel 4.2 Nama-nama Pemerintah Desa Karama	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	37
Gambar 4.1 Proses Sumau	51
Gambar 4.2 Proses Mappatama.....	52
Gambar 4.3 Proses Manette	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara penghasil seni tenunan terbesar di dunia khususnya dalam hal keanekaragaman hiasan, kreasi para penenun generasi terdahulu banyak di pengaruhi unsur-unsur budaya asing akibat pengaruh hubungan perdagangan dengan negara-negara tetangga yang telah berlangsung selama beratus-ratus tahun silam. Kondisi tersebut memberikan sumbangan cukup besar bagi kekayaan keanekaragaman jenis tenunan bangsa Indonesia.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut menjadi landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan asas otonomi daerah tersebut yang memberikan wewenang daerah untuk mengurus wilayahnya dan menjadikan pemerintah daerah harus bisa mengembangkan daerahnya masing-masing yang bertujuan untuk kepentingan masyarakatnya, begitu juga dengan pemerintah daerah Kota Polewali Mandar. Salah satu hal yang harus dikembangkan yaitu mengenai potensi Desa Karama Kecamatan Tinambung. Potensi juga akan memberikan kontribusi dan dampak bagi perekonomian daerah. Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan

umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemberdayaan masyarakat desa adalah “upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”.

Masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan konsep Hak Kekayaan Intelektual yang ada sekarang ini, dikarenakan masyarakat Indonesia justru lebih senang kepemilikan Hak Kekayaan Intelektualnya di gunakan oleh orang lain. Menurut mereka orang-orang yang menggunakan tersebut menyukai hasil karyanya sehingga ada satu kepuasan tersendiri dalam diri akan hal tersebut. Hal ini tanpa mempertimbangkan pembayaran sebuah royalti atas penggunaan barang tersebut. Apabila dibayangkan seseorang yang harus berjuang dengan daya upaya untuk menciptakan suatu barang dan setelah jadi penciptanya tidak dapat menikmati karyanya sebagai akibat adanya pembajakan maka tentu saja hal itu sangat merugikan.

Upaya membudayakan penghargaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus bersama dengan meningkatnya perlindungan hukum atas hak-hak tersebut melalui perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang

memadai. HKI merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia bagi para pencipta dan penemu begitu juga pemilik merek merupakan karya yang harus dilindungi.

Kabupaten Polewali Mandar tidak saja terkenal dengan perahu Sandeqnya tetapi juga ada ciri khas budaya dari kabupaten yaitu "*Lipa*" *sa'be na to Karama*, *beru' beru' na to Kandemeng*" (Sarung sutera dari Karama, bunga melati dari Kandemeng) yang mencerminkan kebanggaan masyarakat tentang hasil karya budaya mereka *Lipa' Sa'be* (Sarung Sutera). Menenun kain sutera bagi orang-orang Mandar di Sulawesi Barat sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang diwariskan turun-temurun, biasanya kaum wanita yang melakukan aktivitas ini, anak-anak-remaja, gadis, hingga perempuan dewasa menenun untaian benang sutera yang kemudian digabungkan hingga menjadi satu kain berukuran besar yang dapat dijahit dan dijadikan sarung.

Masyarakat Mandar masih menggunakan peralatan tradisional mereka secara turun-temurun untuk memproduksi kain sutera mereka. Peralatan tersebut mereka buat sendiri dalam komunitas. Baik peralatan pemeliharaan ulat sutera, memital benang, pewarnaan benang, sampai pada peralatan tenunan. Bahan bahannya mereka ambil dari alam yang ada di sekitar mereka, seperti kayu dari berbagai jenis pohon, bambu, buah-buahan, dan daun-daunan yang di gunakan sebagai bahan pewarna. Dalam waktu yang cukup lama masyarakat khususnya yang ada di Mandar tetap mempertahankan alat tenun tradisional yang mereka miliki. Proses pembuatan selembur sutera

Mandar ini biasanya memakan waktu sepuluh sampai empat belas hari tergantung pada pola, corak dan motifnya. Ada dua nama motif yang umum di dapati pada selembur tenun sutera Mandar, yaitu kadang mereka juga menggabungkan beberapa motif sesuai dengan pesanan.

Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang mendiami desa ini adalah penduduk yang mayoritas berpenghasilan sebagai nelayan, tenun dan pedagang ikan. Hubungan di antara kegiatannya sangat erat, dimana kepala keluarga berprofesi sebagai nelayan dan ibu rumah tangga.

Penelitian ini penting dilakukan oleh peneliti agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya pemberdayaan tentang hak produksi kain tenun sutera Mandar dan dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan daya saing dalam hal kualitas produksi kain sutera mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten polewali Mandar.

Penelitian ini di lakukan agar dapat mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam pemberdayaan produksi kain tenun sutera Mandar atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masyarakat mandar dari desa Karama Kecamatan Tinambung yang masyarakatnya masih menggunakan peralatan tradisional.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka peneliti tepat kiranya mengangkat judul, **"Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kain Tenun Sutera di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Peran Pemerintah Dalam pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung peran pemerintah dalam pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan pengeajin kain tenun Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam pemberdayaan pengrajin kain sutera tenun di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar ?

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan pelaksanaan hukum otonomi daerah terkait tenun sutera di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dengan masalah penelitian yang pada umumnya dan para pecinta seni tenun agar semakin berkembang.
- b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tenun sutera di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.
- c. Agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang masalah-masalah dan lingkup yang di kaji dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Desa Karama Kabupaten Polewali Mandar agar peran pemerintah dalam pemberdayaan produksi kain sutera Mandar agar dapat lebih memperhatikan daerahnya untuk meningkatkan kualitas tenunan dan menjaga hak produksi kain tenun di daerah mereka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebagai bahan perbandingan sekaligus pedoman peneliti. Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan sekaligus pedoman tidak lepas dari tema penelitian yaitu tentang pemberdayaan produksi kain tenun.

1. **Saifullah Hasan (2016)** “Peran Pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Makassar”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Makassar. Untuk melihat peran pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Makassar maka penulis merujuk peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern.

Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah dalam perlindungan terhadap pasar tradisional di Kota Makassar dari aspek perlindungan hukum pemerintah kota Makassar lebih memilih peraturan daerah nomor 15 tahun 2009, namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal, dari segi isi perda tersebut masih perlu diperjelas mengenai aturan seperti zonasi pasar tradisional dan pasar modern yang masih diperjelas mengenai aturan seperti zonasi pasar tradisional yang masih

kurang jelas, selain itu aturan perizinan dan pendirian pasar juga kurang optimal di tandai dengan semakin menjamurnya pasar modern dan toko modern di Kota Makassar yang berdampak pada keberlangsungan pasar tradisional. Peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap pasar tradisional masih kurang dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pedagang pasar tradisional.

2. **Nenny Dwi Ariani, Kholis Roisah (2016)** “Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Kain Tapis Dan Siger Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional”

Kain Tapis dan siger bagi masyarakat adat Lampung bersifat sakral dan berfungsi sebagai busana adat yang penggunaannya bersifat khusus, namun saat ini telah terjadi desaktralisasi terhadap kain tapis dan siger Lampung. Penelitian ini berfokus pada urgensi Kain Tapis dan Siger mendapat perlindungan hukum, Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam melindungi kain tapis dan Siger, dan kebijakan ideal dalam melindungi Kain Tapis dan Siger.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Kain Tapis dan Siger sangat urgen baik ditinjau secara filosofis, sosialisasi dan yuridis. Kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Lampung melakukan optimalisasi terhadap peraturan daerah yang terkait dan membuat rancangan peraturan daerah tentang perlindungan Kekayaan Intelektual tahun 2015. Kendalanya berupa aspek substansi, struktur dan kultur. Kebijakan ideal yang dilakukan yaitu membuat peraturan daerah Provinsi

Lampung dan peraturan daerah Kabupaten atau Kota yang substansinyaberisis ketentuan khusus tentang kain Tapis dan Siger serta membuat peraturan pelaksanaan berupa peraturan Gubernur, Bupati dan Walikota.

3. **Hamami Cahya Prastika (2016)** “Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan”

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan. Latar belakang dari permasalahan ini yaitu UMKM unggulan dengan hasil produksi tertinggi sebesar 76.462.240.300 pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan UMKM yang lainnya. Oleh sebab itu, penelitian ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku UMKM dalam pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan.

Hasil dari penelitian ini yaitu peran pemerintah dan partisipasi pelaku UMKM dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan sudah berjalan dengan baik. Tipologi dan peran pemerintah yaitu terdapat pada peran pemerintah sebagai fasilitator karena pemerintah berperan dalam penyediaan alat berupa mesin jahit, menyediakan wadah pendampingan tim digital e-IKM serta memberikan pelatihan. Sedangkan pada partisipasi pelaku UMKM menggunakan

mesin pemberian dari pemerintah dan mengikuti program pelatihan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk pengembangan UMKM kerajinan kulit menjadi produk unggulan Kabupaten Magetan. Hanya saja terkendala oleh permasalahan Sumber Daya Manusia yang semakin berkurang serta memiliki skil yang rendah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama 1	Judul 2	Persamaan 3	Perbedaan 4
Saifullah Hasan (2016)	Peran Pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Makassar	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, memberikan gambaran faktual mengenai peran pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di kota Makassar	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Makassar. Untuk melihat peran pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Makassar maka penulis

			merujuk peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern.
Nenny Dwi Ariani, Kholis Roisah (2016)	Upaya Pemerintah dalam Melindungi Kain Tapis Dan Siger Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional	Penelitian ini berfokus pada urgensi Tapis dan Siger mendapat perlindungan hukum, kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam melindungi Kain Tapis dan Siger dan kebijakan ideal dalam	Kain Tapis dan siger bagi masyarakat adat Lampung bersifat sakral dan berfungsi sebagai busana adat yang penggunanya bersifat khusus, namun saat ini telah terjadi desaktralisasi terhadap kain tapis

		melindungi Kain Tapis dan Siger	dan siger Lampung.
Hamami Cahya Prastika (2016)	Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilaksanakan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan

B. Pengertian Peran

1. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran merupakan konsep aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan sesuatu peran. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian pelaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempatkan suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi di antara mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Menurut J.Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan contoh, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat .

Peran sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklarifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Peranan yang diharapkan, cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan harus dilaksanakan dan peranan ini tidak dapat ditawar seperti yang ditentukan.
2. Peranan yang disesuaikan yaitu, cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini dilaksanakannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status kedudukan tertentu.

2. Pengertian Peran Pemerintah Menurut Para Ahli

Peran pemerinta menurut Henry J. Abraham (Tjokromidjojo, 1988:18) dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahwa seringkalifungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
2. Kemudian timbul pengertian Service State, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai Welfare State atau negara kesejahteraan.
3. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai entrepreneur atau dorongan inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "developmentagent" unsur pendorong pembaharuan atau poembangunan.

Peran pemerintah seperti yang telah dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2009:132) peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi peraturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.

Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (basicsecurity) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan

kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial (Nyoman Sumaryadi, 2010:21).

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuan yang dikendalikan oleh norma dan nilai dalam hubungan interaksi dengan lingkungan (Sitanggang,1996:134). Pendapat para ahli diatas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki, hal ini sejalan dengan Talidzu Ndraha (2011) peranan pemerintah adalah segala proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional seperti sebagai berikut:

1. Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji.
2. Setiap masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dsndijsmin melalui cividservice.
3. Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjiana.
4. Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya .

5. Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab.
6. Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam hal konsumen (masyarakat) tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah).

Sumordoningrat (2005:55), peran pemerintah terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan UKM antara lain :

1. Interpreniur

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk merangsang jalanya suatu bisnis seperti dalam hal mengenai produk baru, menentukan produk baru, menyusun operasi untuk mengadakan produksi baru dan mengatur permasalahan operasi.

2. Koordinator

Pemerintah daerah sebagai koordinator dalam usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengerahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan humoris pada sasaran yang telah ditentukan.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan tradisional (perilaku untuk budaya masyarakat) di daerahnya dan mengatur penetapan tata ruang daerah yang lebih baik.

4. Stimulator

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulator dalam menciptakan dan mengembangkan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi investor baru agar masuk dan mempertahankan serta menumbuh kembangkan investor yang telah ada di daerahnya, seperti pembuatan brosur-brosur usaha dan koperasi, dan membantu usaha usaha dan koperasi untuk melakukan pameran dan sebagainya.

Pemerintah atau "*Government*" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "*The Authoritative direction and administrator of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc*". Atau berarti dalam bahasa Indonesia "Pengarahan dan administrasi dan berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya".(Sudarmayanti:2004).

Usman (2003:8), pemerintah dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan senjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang di persiapkan oleh suatu organisasi untuk untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

(investasi) maupun barang pakai habis yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, pengadaan, penerimaan atau penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan atau pelanggan, pengawasan evaluasi dan pelaporan.

5. Fungsi Keamanan

Fungsi pemerintah dibidang pertahanan, keamanan, ketertiban umum, dan pengamanan serta perlindungan sudah termasuk dan terkait dengan fungsi pemerintah di bidang perumusan kebijakan (pengaturan), pelayanan, pemberdayaan, dan fungsi pengelolaan aset atau kekayaan negara. Misalnya, fungsi keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas aparat kepolisian yang dapat juga dirumuskan sebagai fungsi pelayanan keamanan dan ketertiban umum kepolisian.

Menurut Nigraha (2000:85), fungsi pemerintah tersebut ada dua macam yaitu :

1. Pemerintah mempunyai fungsi primer dan fungsi pelayanan (*service*) sebagai provider jasa publik yang di privatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
2. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan.

Rasyid dalam Nirwana (2003:13), bahwa secara umum tugas-tugas pokok pemerintah yaitu:

3. Fungsi dan Tugas Pemerintah

Menurut Talizidulu (2011:89), dalam memenuhi kebutuhan pasar manusia perlu bekerja sama, dan berkelompok dengan orang lain dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol sebagai aktivitas dan mengembangkan masyarakat. Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat.

Rewansyah dalam Akbar, (2016:19-20), mengungkapkan bahwa secara umum pemerintah memiliki lima fungsi atau peranan utama eksekutif (pemerintah) yaitu:

1. Fungsi Pengaturan atau Regulasi

Fungsi pengaturan atau regulasi (penetapan kebijakan publik atau negara) adalah fungsi yang tidak dapat didelegasikan ataupun diprivasikan kepada organisasi atau lembaga diluar pemerintahan. Kebijakan tersebut dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis, kebijakan-kebijakan pemerintah negara perlu dirumuskan secara tertulis dengan mengikuti suatu “national egaldrafinf system and proces” dan dituangkan dalam aturan perundang-undangan yang tepat sehingga memiliki kekuatan dan kepastian hukum serta jelas keterkaitan dan kesesuaiannya satu sama lain, dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan pemegang kedaulatan rakyat.

2. Fungsi Pelayanan Kepada Masyarakat

Menurut Ryass Rayid dalam buku makna pemerintah itu ditinjau dari segi etika dan kepemimpinan dalam Rival (2010:27), ada tiga fungsi hakiki pemerintah, yaitu pelayanan (*Service*), pemberdayaan (*Empowement*), dan pembangunan (*Development*). Fungsi pelayanan yaitu pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hankam, layanan civil dan layanan birokrasi.

3. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Fungsi pemberdayaan masyarakat adalah fungsi yang berhubungan secara negatif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial warga masyarakat dalam arti semakin tinggi taraf hidup warga masyarakat, semakin kuat posisi tawar (*bargainingposition*) semakin interaktif masyarakat. Pemberdayaan terus-menerus, komperhensif, dan stimulan sampai ambang bata tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan warga masyarakat.

4. Fungsi Pengelolaan Aset atau Kekayaan Negara

Aset atau kekayaan Negara merupakan sumber daya yang terdapat di bumi Indonesia yang merupakan milik Negara Indonesia yang dikelola/diurus oleh pemerintah. Sumber daya alam dewasa ini sudah menjadi komoditas politik baik dalam maupun ke luar.

Menurut Fahmi (2011:113), pengeloaan sumber daya pentaan barang-barang baik yang mempunyai manfaat lebih dari setahun

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya perselisihan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga dan non-pemerintahan atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah .
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, misalnya membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan kesektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti pengendalian laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dengan antara bangsa serta kebijakan yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi Negara dan masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan.

C. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum pemberdayaan telah didefinisikan dengan berbagai pendapat. Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*pople-centered, participatory, empowering and sustainable*". (Kartasmita:2005).

Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris "*impowerment*" yang dapat bermakna "pemberian kekuasaan" karena power bukan sekedar daya tapi juga kekuasaan sehingga kata "daya" tidak saja bermakna "mampu" tapi juga bermakna "mempunyai kekuasaan" (Wrihartnolo dan Dwijiwitono:2007).

Dengan melihat permasalahan dan tantangan yang ada dalam rangka pemberdayaan masyarakat, strategi kebijakan yang diambil adalah (Fahmi,2011:12):

1. Membangun kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pemerintah dan dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan kesejahteraannya.
2. Mengembangkan kapasitas organisasi ekonomi masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan usaha ekonomi-produktif secara kompetitif

dan menguntungkan yang dapat memberikan lapangan kerja dan pendapatan yang layak.

3. Meningkatkan upaya memihak kepada masyarakat miskin dengan menciptakan iklim ekonomi, pengembang sektor ekonomi real.
4. Mengembangkan lembaga keswadayaan untuk membangun solidaritas dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

D. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bias dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan pemberdayaan menurut Ambar Teguh Sulistyani yang dikutip oleh Aziz Muslim dalam buku yang berjudul *Dasar-dasar pengembangan masyarakat*, bahwa tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah :

Pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu, dan demikian akan dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya penyadaran ini dapat mengunggah pihak lain yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku.

Kedua, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan, dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan dan kecakapan keterampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki, sehingga nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan dan kecakapan keterampilan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan kecakapan keterampilan yang pada akhirnya akan mengarahkan pada kemandirian.

Secara keseluruhan bahwa menurut Ambar Teguh Sulistyani menyatakan tahapan pemberdayaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu kesadaran, transformasi pengetahuan dan kecakapan, sedangkan yang paling akhir adalah tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Sedangkan menurut Isbandi Rukminto Adi, bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari 7 (tujuh) tahapan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan, yaitu petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksud untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan

penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.

2. Tahap assesment, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternative program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Tahap formulasi rencana aksi, pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditunjukkan kepihak peyandang dana.
5. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat mengimpelementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjamin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang suatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng saat dilapangan

6. Tahap evaluasi, tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.
7. Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

Dari penjelasan teori tahapan pemberdayaan yang dijelaskan oleh Isbandi Rukminto Adi, dapat diketahui bahwa tahapan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 7 tahapan, meliputi tahap persiapan, tahap assessment, tahap perencanaan, tahap formulasi rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi.

E. Produksi

Produksi diartikan sebagai atau penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang sama sekali berbeda baik dalam pengertian apa, dimana atau kapan komoditi-komoditi di alokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditi itu. Iswandono 2004:14 menyatakan bahwa teori produksi sebagaimana teori konsumen merupakan teori pemilihan atas berbagai alternatif yang tersedia. Dalam hal ini

adalah keputusan yang diambil seorang produsen untuk menentukan pemilihan atas alternatif tersebut.

F. Tenun Sutera Mandar Sulawesi Barat

Pada awalnya masyarakat umumnya tidak mengetahui kalau kain sutera di buat dari serat yang diambil dari sejenis binatang ulat, sampai kemudian pendeta-pendeta Eropa mencuri sejumlah bibit ulat sutera dan murbei dari Cina sudah memiliki pengalaman memelihara ulat sutera. Sutera masuk ke Indonesia di perkiraan jelang abad 14 jauh lebih awal, dibawa oleh para pelaut dan tentara. Cina yang mengunjungi kerajaan di Nusantara.

Tenun tradisional sutera masyarakat Mandar telah berlangsung cukup lama dan telah mengalami pasang surutnya sesuai dengan perkembangan zaman. Hanya saat ini tenunan tradisional tersebut masih dapat ditemukan dalam masyarakat. Dalam perjalanan waktu tenun tradisional sutera mengalami perkembangan mengikuti zaman. Perkembangan yang mengikuti aspek internal dalam kebudayaan Mandar dan juga aspek eksternal. Dalam kehidupan sehari-hari orang Mandar ingin maju dan seperti masyarakat dan kebudayaan lainnya di Indonesia sehingga masyarakat Mandar harus melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya. Demikian dalam hal busana mereka membutuhkan pakaian yang tidak lagi terpaku pada masa lalu dengan warna-warni yang suram dan gelap, sehingga warna-warni dan motif sutera yang mereka tenun semakin lebih bervariasi.

Industri tenunan sutera di Mandar dibarengi dengan pemeliharaan ulat sutera dan tanaman murbei. Meskipun demikian produksi benang sutera lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan penenun di Mandar. Masyarakat penenun di Mandar menggunakan benang benang inport yang datang dari India dan Cina. Jenis-jenis benang tersebut memiliki kualitas yang berbeda-beda. Benang India ini adalah benang sintesis yang disebut dengan krayon. Benang ini memiliki sedikit unsur sutera tetapi cenderung lebih kuat dan tidak mudah putus dan harganya lebih murah. Benang Cina kualitasnya lebih baik dan harganya juga lebih murah.

Meskipun masyarakat Mandar lebih memasuki era modern dengan berbagai kemajuan teknologi yang semakin canggih namun dalam menenun masyarakat Mandar tetap mempertahankan alat tenunan tradisional (godokan). Meskipun dalam perkembangannya alat tenun ini juga telah diciptakan alat tenun mesin (ATM) yang bisa memproduksi kain lebih banyak dibanding alat godokan namun masyarakat masih bertahan menggunakan alat tradisional mereka.

Selain mempertahankan corak-corak lama dalam tenunan tradisional, mereka juga menciptakan motif-motif baru dengan menyesuaikan dengan berbagai perkembangan. Motif-motif baru yang tercipta tersebut sebagian adalah pengembangan corak-coral lama, sebagai pesanan dari orang-orang penting (tokoh masyarakat), dan sebagian lagi terinspirasi oleh alam dan lingkungan masyarakat Mandar.

Lestarinya tenunan tradisional sutera ini disebabkan oleh hasil tenunan masih dibutuhkan masyarakat, baik oleh masyarakat Mandar selain juga oleh masyarakat di luar Mandar. Sutera hasil tenunan tradisional Mandar terkenal dengan mutunya yang cukup baik. Selain tenunan halus coraknya pun cukup bervariasi dengan sejumlah warna pilihan.

Sarung Mandar yang bercorak kotak-kotak di bangun atas garis garis lurus yang berdiri vertikal dan melintang secara horizontal dan saling berpotongan antara satu dengan yang lain. Garis yang disebut dapat dimaknai sebagai bentuk kuat dan tegasnya aturan dalam masyarakat Mandar yang mengatur hubungan secara vertikal antara rakyat dengan pemimpinnya dan di anantara semua pemimpin atau sesama rakyat secara horizontal dengan memperhatikan srata dalam masyarakat.

Adapun alat penegelolaan bahan yaitu :

1. Alat Pengelolaan Bahan

Dalam Kerajinan tenun sutera tradisional digunakan alat dan bahan yang sangat sederhana, yang dibuat sendiri oleh pengrajin. Peralatan dari bahan kayu dan bambu dari pohon dilingkungan alam sekitar. Pengelolaan benang sutera juga menggunakan peralatan yang sederhana, ada lima macam peralatan. Jarum terbuat dari logam baja yang halus untuk mendapatkan ketebalan/keutuhan benang.

Alat pemintal benang antara lain *peluncur* atau disebut juga sokoce yaitu alat untuk menggulung benang terbuat dari bambu kecil.

Kemudian *paqayungan*, alat penggulung benang yang berukuran besar terbuat dari bambu. *Roweng* alat penggulung benang yang digunakan untuk mengguung benang setelah direndam dan diwarnai. *Galendrong*, alat pengguung terbuat dari pipa paralon digunakan untuk menggulung benang yang akan disimpan. Bahan pembuatan/pengolahan bahan, terdiri dari benang sutera. Mula-mula disiapkan abu untuk merendam benang. Abu diperoleh dari pembakaran mayang kelapa yang sudah kering atau bisa juga disebut oleh orang Mandar *kaqloeng*, dan *cingga* yaitu bahan pewarna dari bahan alam.

2. Alat Tenun Gedongan (*panetteg*)

Alat tenun tradisional ini memiliki sejumlah peralatan yang digunakan untuk menyusun dan merangkai helai-helai benang yang menjadi satu kesatuan dan menjadi kain. Peralatannya sebagai berikut.

Pattandayangan, berfungsi sebagai tiang peyangga untuk pemalu serta lenteran alat lain dari depan sampai belakang. Alat ini terbuat dari beberapa potongan kayu bersegi empat dan dibentuk seperti tiang dengan penyangganya. *Palu*, alat ini terbuat dari kayu, berukuran panjang 1 meter dan lebar 30 cm. Posisi alat ini berada di atas *pattandayangan* dengan fungsi sebagai penggulgug benang yang akan ditenun.

Palumu-lumu, alat ini berfungsi sebagai pembatas antara posisi benang yang melintang dari atas kebawah secara menyilang. Alat ini

terbuat dari bambu kecil yang bulat *taro'da* dengan panjang 1 meter, dan bagian sisi kanan dan kirinya 1,5 cm , berada di bagian tengah diurutan keempat dari depan kebelakang setelah *Palapa*.

Awerang, berfungsi sebagai pembatas benang yang melintang dari bawah keatas secara menyilang. Terbuat dari bambu dengan panjang 1 meter dan bagian sisi kanan dan kiri 5 cm. Bambu yang dipilih adalah bambu yang memil iki satu ruas saja sehingga dipotong pada ujung ruas masing-masing. Alat ini berada di po sisi tengah diurutan keenam dari depan kebelakang setelah *Passamba*.

Susuq Ale, alat ini berfungsi untuk mengangkat benang ke atas setiap benang pa'ang atau benang pakan yang simasukan bambu tersebut, dibuat belahan kayu keras yang membulat yang sama panjang. Susuq ale diberi benang-benang putih untuk menarik benang-benang yang ditenun bila akan ditarik keatas. Alat ini berada di bagian tengah atas di urutan ketujuh dari mdepan kebelakang setelah *awerang*.

Suruq, alat ini berfungsi sebagai alat cetak. Alat yang mengatur jarak setiap benang yang terurai. Alat *suruq* ini mempunyai jarak yang sangat tipis dan menyerupai sisir yang berjarak rapat. Dichelah anak sisir itulah dimasukkan sehelai-helai benang satu persatu. *Suruq* terbuat dari kayu pohon Balambang sejenis nipa, biasanya dibuat dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 10 cm.

Panetteq, alat ini berfungsi sebagai pencetak atau alat yang merapatkan benang pakan satu sama lain yang menyusup di sela-sela benang lungsi. Alat ini dibuat dari kayu hitam dan ujungnya dibentuk menyerupai mata pedang. Alat ini cukup berat 0,5 kg, panjang 1 meter dan lebar 5 cm. Alat ini yang dihentakkan ketika benang dicetak.

Toraq, alat ini terbuat dari bambu yang berdiameter 1-1,5 cm dengan panjang 30 cm. Alat ini menjadi tempat penggulung benang (pappamalingan) yang dimasukkan. Salah satu ujung *toraq* terdapat ruas yang ditengahnya diberi lubang tepat ujung benang keluar.

Pappamalingan, alat ini sederhana hanya sebuah batang kayu panjangnya antara 20-25 cm, pada alat inilah benang tenunan digulung secukupnya.

Passa, alat ini tempat menggulung kain yang sudah ditenun. *Passa* terbuat dari balok-balok yang keras dan bentuk segi empat panjang. Selain untuk menggulung kain yang sudah jadi, alat ini juga berfungsi untuk mengencangkan tarikan benang tenun. *Passa* dikaitkan dengan alat *talulang* yang berfungsi sebagai sandaran bagi penenun.

Gulang Pondag, alat ini adalah tali pengikat antara *passa* dengan *latulang*. Alat ini untuk menarik tenunan agar tidak kendur.

Latulang, alat untuk dijadikan sandaran, terbuat dari kayu ditengahnya terdapat bidang datar untuk bersandar.

Passolorang, alat ini adalah tempat sandaran alat lain. *Passu*, alat untuk mengukur jarak antara masing-masing kotak atau garis-garis dalam tenunan, digunakan alat ukur sederhana dari bahan bambu tipis tau karton. Ulat sutera yang ditenakkan kemudian akan menjadi benang sutera yang siap ditenun. Ada benang sutera yang diproses dari ulat sutera yang dijual dan siap dipakai.

Papamalingan, alat ini tampak sederhana kerana hanya sebuah batang kayu kecil yang panjangnya 20-25 cm, pada alat inilah benang tenunan digulung secukupnya. Benang inilah yang dimasukkan ke dalam *toraq*.

Alat ini biasa dibuat dari gulungan benang yang banyak atau terbuat dari kain, tetapi beberapa penenun menggunakan tali plastik/nilon yang lebih kuat. *Talutang*, adalah alat yang dijadikan sandaran oleh penenun. Alat ini jika disabdari oleh penenun maka benang-benang tenunan akan ikut tertarik dan menjadi rentang (tidak kendur lagi).

Passolorang, alat ini adalah tempat bersandar alat lain yang keluar masuk dari celah benang terutama penette, sehingga tidak jatuh ke lantai.

Passu, alat untuk mengukur jarak antara masing-masing kotak atau garis-garis dalam tenunan, digunakan alat ukur yang sederhana yang

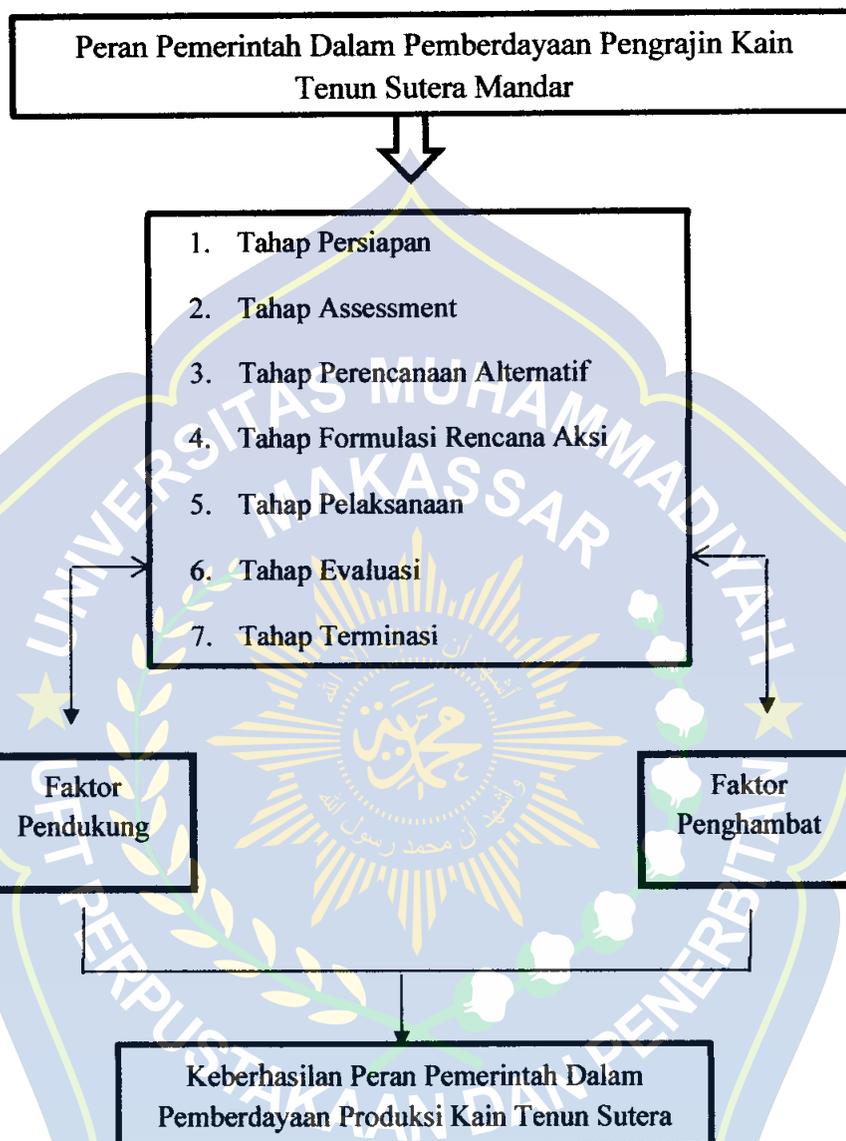
dibuat dari daun lontar, belahan bambu tipis atau kertas tebal atau karton.

G. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar untuk mengetahui pentingnya dilakukan penelitian agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya pemberdayaan tentang hak produksi kain tenun sutera Mandar dan dapat menjadi pedoman guna meningkatkan daya saing dalam hal kualitas produksi kain sutera .

Penelitian tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan produksi kain tenun sutera Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar ini akan di analisis berdasarkan indikator yang di kemukakan oleh : Sumordinigrat (2005:55) yaitu: 1) Interpreniur, 2) Koordinator, 3) Fasilitator, 4) Stimulator.

Uraian yang telah dikemukakan, secara mendasar. Adapun kerangka pikir penelitian seperti pada gambar.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

H. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Dengan demikian, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Produksi Kain Tenun

Sutera Mandar dan dapat menjadi pedoman guna meningkatkan daya saing dalam hal kualitas produksi kain sutera di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten polewali Mandar.

I. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan, yaitu petugas dan penyiapan lapangan untuk para penenun dan terdapat kelompok penenun untuk menunjang pemberdayaan kain tenun sutera. Sedangkan penyiapan lapangan berada di Desa Karama di sana telah di sediakan tempat dan alat untuk menenun bagi masyarakat.
2. Tahap assesment, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Karama dalam hal pemberdayaan karena kurangnya peminat kain tenun sutera dan kadang mereka hanya menunggu pesanan dari kantor-kantor dan dalam hal sumber daya untuk meneun di Desa Karama masih mengambil dari Desa lain.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahapan ini rencana yang telah dibuat untuk memberdayakan kain tenun sutera di Desa Karama rencana yang telah dibuat oleh pemerintah Desa karama terkendala dengan kurangnya pemasaran dan terkait sekarang pandemik Corona yang aktivitas masyarakat sangat terbatas dan pengunjung dari luar juga kurang.

4. Tahap formulasi rencana aksi, pada tahap ini ketua kelompok penenun melakukan promosi keluar dan terkadang mengikuti berbagai pameran-pameran di luar daerah.
5. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk proses pelaksanaan di mana bahan-bahan yang didapatkan dari Desa lain yang di sediakan dari pemerintah dan masyarakat yang mengelolanya menjadi sarung tenun sutera.
6. Tahap evaluasi, tahap ini pemerintah Desa dan ketua kelompok tenun melakukan proses pengawasan kepada masyarakat kelompok dalam proses meneun kain dan terkadang pemerintah provinsi juga datang untuk melakukan evaluasi di Desa Karama kepada kelompok masyarakat tenun.
7. Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk proses produksi kain tenun sutera. Jadi tidak ada pemutusan kerja sama yang akan dilakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan 08 Maret 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan produksi kain tenun sutera Mandar di Desa Karama Kecamatan Timanbung Kabupaten Polewali Mandar.

Adapun tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan produksi kain tenun sutera Mandar di Desa Karama Kecamatan Timanbung Kabupaten Polewali Mandar secara objektif.

C. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dilaksanakan dengan melalui cara purposive memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan

dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan dari suatu penelitian.

Tabel. 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan
1	Ahmad Ma'Danrang	AM	Kepala Desa Karama
2	Sitti Aisyah	SA	Ketua Kelompok Tenun
3	Mastia	MA	Masyarakat Penenun
4	Nurhayati	NH	Masyarakat Penenun
5	Naisa	NS	Masyarakat Penenun
6	Sura	SR	Masyarakat Penenun
7	Asia	AS	Masyarakat Penenun

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Data primer, yang diperoleh secara langsung dari informan berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah orang yang berkaitan dengan pemberdayaan produksi kain tenun Mandar melalui pelaksanaan Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah.
2. Data sekunder, yang diperoleh dari literatur dan dokumen serta data yang telah dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan peneliti. Adapun laporan yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari jurnal, buku dan majalah atau sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam melakukan proses penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan:

1. Wawancara

Dilakukan guna memperoleh data primer tentang peran pemerintah dalam perlindungan produksi kain tenun sutera di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

2. Studi dokumen

Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara menggunakan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa.

3. Media review

Melakukan *review* terhadap pemberitaan, media cetak maupun *on-line* yang berkaitan dengan penelitian.

4. Observasi

Melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi di fokuskan pada pengamatan langsung.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi kegiatan analisis data terdiri dari tiga yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Kegiatan ini dilakukan peneliti dengan proses penelitian penyederhanaan, pemusatan data-data dari hasil wawancara dilapangan, yang bertujuan untuk lebih memudahkan penulis dalam melihat hasil wawancara dari berbagai narasumber dan memudahkan pembaca melihat hasil wawancara dengan hasil yang lebih sederhana dan akurat.

2. Penyajian Data

Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti dengan memperhatikan data-data informasi hasil wawancara dengan para narasumber yang memiliki kesimpulan dalam setiap pembahasan. Sehingga mempermudah peneliti melihat hal yang akan dilakukan selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ketiga yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil data-data yang diperoleh di lapangan dan dari hasil penjelasan dari berbagai informan yang di wawancara. Untuk selanjutnya di simpulkan dan dilihat bahwa data tersebut akurat dan dapat dipercaya sesuai kejadian di lapangan.

F. Teknik Pengabsahan Data

Salah satu cara yang dapat digunakan proses pengabsahan data hasil penelitian adalah dengan hasil triangulasi, yaitu sebagai pengecekan data dari sumber-sumber yang diperoleh yang didapatkan melalui berbagai cara dan waktu menurut William dalam Sugiyono (2015).

1. Triangulasi Sumber

Kegiatan ini dilakukan peneliti untuk melakukan uji kredibilitas data yang telah dilakukan dengan cara memeriksa data melalui beberapa sumber yang telah diperoleh selama di lapangan.

2. Triangulasi Teknik

Kegiatan ini dilakukan peneliti untuk menguji data yang dilakukan dengan memeriksa data kepada sumber dengan metode yang berbeda-beda disetiap lokasi penelitian.

3. Triangulasi Waktu

Kredibilitas data juga sering dipengaruhi oleh waktu. Sehingga untuk memperoleh waktu yang ideal dalam meneliti, peneliti yang telah melakukan observasi terlebih dahulu mengetahui waktu-waktu yang tepat untuk melakukan wawancara dengan narasumber.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Demografi Desa

a. Geografi

Secara geografi wilayah Desa Karama Kecamatan Tinambung, Desa Karama terletak di bagian timur paling ujung Kecamatan Tinambung dengan batas wilayah :

- Sebelah utara : berbatasan dengan kelurahan Balanipa
- Sebelah selatan : berbatasan langsung dengan laut Mandar
- Sebelah Barat : berbatasan dengan desa Tangnga-tangnga
- Sebelah timur : bebatasan dengan desa Tammangalle

Dimana pusat pemerintah di pusatkan di dusun Karama dan disitu pulalah di tempatkan kantor kepala desa. Karama merupakan salah satu desa dengan wilayah terluas di kecamatan Tinambung dengan luas wilayah +299 ha yang terdiri dari areal pertanian +64 ha, areal pemukiman +205 ha, dan lain-lainnya +30 ha ini termasuk pemintalan tali.

b. Geohidrologi

Wilayah desa Karama dialiri oleh sebuah sungai kecil yang biasa disebut masyarakat sebagai RURA walaupun debit airnya di sungai ini kurang

tapi sebagian masyarakat dusun Manjopai tetap memanfaatkannya sebagai sumber mata air untuk kehidupan dan keperluan lainnya.

c. Klimatologi

Kondisi iklim di sebagian besar desa Karama tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah kecamatan Tinambung dan bahkan desa Karama secara umum dengan dua musim yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan juni hingga agustus, dan musim hujan antara bulan september hingga mei dengan temperatur udara rata-rata berkisar antara 22, 00 C sampai 30, 46 C dan suhu maksimum terjadi pada bulan oktober dengan suhu 31'00C serta suhu minimum 20'70 C terjadi pada bulan juni. Kelembaban udara berkisar antara 80% kelembaban udara maksimum terjadi pada bulan maret dan november sebesar 85% sedangkan kelembaban minimum terjadi pada bulan september dan agustus sebesar 78%.

Lamanya penyinaran matahari yang terjadi selama rata-rata 68, 67%, lamanya penyinaran matahari maksimum terjadi pada bulan juli sebesar 86% dan lamanya penyinaran matahari minimum terjadi pada bulan februari, november dan desember sebesar 49 %. kecepatan angin rata-rata yang terjadi selama sebesar 207/8 knot, kecepatan maksimum terjadi pada bulan februari yaitu 270/10 knot, sedangkan kecepatan minimum terjadi pada bulan mei sebesar 135/8 knot, tekanan udara yang ditandai dengan dua musim yaitu musim kemarau dengan musim hujan. Tekanan udara berkisar antara 1. 001, 60 mbs - 1. 006, 60 mbs

sedangkan keadaan curah hujan pada tahun 2008 sebesar 144, 29mm dengan curah hujan terendah bulan juli sebesar 0, 0mm dan curah hujan tertinggi pada bulan november sebesar 448, 90mm.

2. Keadaan Sosial Desa

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Karama rata-rata berpendidikan SD atau sederajat sampai SMA atau sederajat dan Jenjang Paling Tinggi

Dalam hal kesediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Karama tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Karama baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 6 tahun (SD), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas yang terdekat berada di ibu kota kecamatan.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Karama, yaitu melalui pelatihan, pembinaan dan kursus.

3. Keadaan Ekonomi Desa

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Karama. Rp. 1000.000/Bln Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Karama dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, Nelayan jasa/perdagangan, industri dan lain-lain (Lihat Tabel) tentang Sumber daya manusia). Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor Nelayan +_ 582 Orang PNS berjumlah 49 orang, yang bekerja di sektor industri +_ 300 orang, dan bekerja di sektor Angkutan 5 Orang lain-lain -+48 orang.

Tabel 4.1

Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	2640	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	2745	orang
	c. Jumlah keluarga	1349	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	582	orang

	b. PNS	49	orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	27	orang
	d. Perdagangan besar/eceran	48	orang
	e. Angkutan	15	orang
	f. Pemintal tali	300	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	139	orang
	b. Lulusan D III	29	orang
	b. Lulusan SLTA	431	orang
	c. Lulusan SMP	401	orang
	d. Lulusan SD	1731	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	350	orang

Sumber : Data Dari Kader

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagai sebuah Desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Karama tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

5. Nama- Nama Pemerintahan Desa Karama

Tabel 4.2 Nama-nama pemerintah Desa Karama

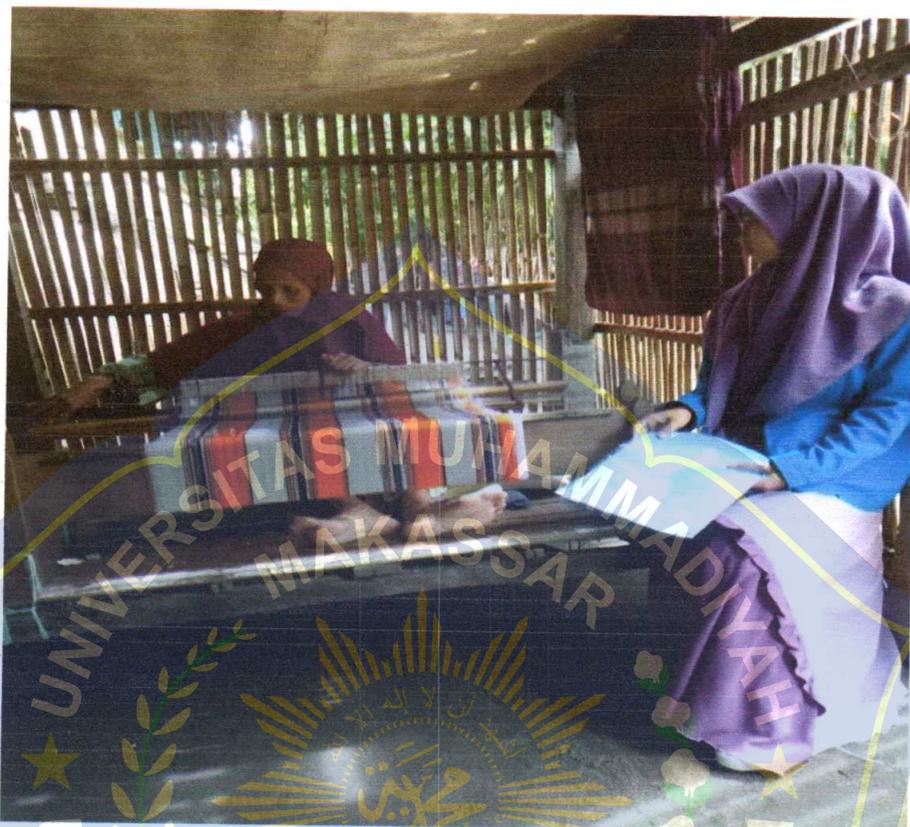
NO.	Nama	Jabatan
1	Ahmad Ma'danrang	Kepala Desa
2	Taslim	Sekretaris Desa
3	Takdir.B	Kaur Keuangan
4	Sri Julita	Kaur Perencanaan
5	Irmadayanti	Kaur TU & Umum
6	Johan	Kasi Pemerintahan
7	Nurhayati	Kasi Pelayanan
8	Bambang Suhardjo	Kasi Kesejahteraan
9	Ilham.B	Kadus Mojopai
10	Sallin	Kadus Karama
11	Baharuddin,SH	Kadus Lambe

6. Gambaran Proses Produksi Kain Tenun

Rangkaian proses kerja untuk menilai postur kerja dalam penelitian ini adalah proses kerja pembuatan *Lipa' Sa'be* Mandar. Pemilihan proses kerja bertujuan untuk menentukan salah satu pekerjaan yang terpilih sebagai objek penelitian yang dilakukan pada penenun *Lipa' Sa'be* Mandar yang tersebar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

a. Proses *Sumau'*

Untuk mengatur *benang lungsi* pada proses *sumau*, masyarakat Mandar biasanya memanfaatkan kolom rumah yang cukup luas sebagai sarana pembuatan sautan. Panggung *sautan* tersebut biasanya dibuat di antara tiang-tiang kolom rumah yang terbuat dari *gamo* (pelepah daun rumbia). Postur tubuh yang dilakukan pada pekerja



Gambar 4.2. Proses Mappatama

Pada proses *Mappatama*, posisi pekerja harus menyesuaikan dengan peralatan kerjanya dan objek yang dikerjakan. Oleh karena itu pekerja seringkali berada dalam postur janggal seperti membungkuk, menunduk dan duduk dalam waktu yang sangat lama.

c. Proses Manette'

Proses *Manette'* atau menenun *Lipa' Sa'be* Mandar sejak dahulu dilakukan dengan menggunakan alat tradisional yang bernama *parewa tandayang* yang diciptakan dan diproduksi secara turun temurun oleh masyarakat Mandar. Postur tubuh yang dilakukan pada pekerja penenun *Lipa' Sa'be* saat proses *Manette'* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

penenun *Lipa' Sa'be* saat proses *sumau* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.1. Proses *Sumau*

Pada saat proses *sumau* ini pekerja melakukannya dalam posisi berdiri, agak membungkuk dan menunduk untuk menyesuaikan posisi tubuh dengan posisi atau letak objek pekerjaan.

b. Proses *Mappatama*

Periksa benang *lungsi* terlebih dahulu sebelum melakukan proses *mappatama* atau memasukkan benang ke dalam *tandayang*. Segera lakukan penyambungan bila menjumpai adanya benang yang terputus. Postur tubuh yang dilakukan pada pekerja penenun *Lipa' Sa'be* saat *Mappatama* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.3. Proses *Manette*'

Pada proses *Manette*' inilah proses akhir pembuatan *Lipa' Sa'be* Mandar, posisi pekerja harus menyesuaikan dengan peralatan kerjanya dan objek yang dikerjakan. Oleh karena itu pekerja seringkali berada dalam postur janggal seperti membungkuk, menunduk dan duduk dalam waktu yang sangat lama. Pada proses *Manette*' inilah pekerja sering mengalami keluhan otot hampir di semua bagian tubuh, mulai dari leher, tangan, pinggang, punggung, paha, betis, hingga bagian kaki.

B. Hasil Penelitian

I. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kain Tenun di Desa Karama

Isbandi Rukminto Adi, dapat diketahui bahwa tahapan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 7 tahapan, meliputi tahap persiapan, tahap assessment, tahap perencanaan, tahap formulasi rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi, yaitu :

1. Tahap Persiapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Karama, mengungkapkan bahwa :

“Ya, jadi pemerintah sangat berperan dalam hal ini bagaimana pun kita tau bahwa Desa Karama ini terkenal dengan adanya kain tenun sutera jadi otomatis peran kita m engajak kepada masyarakat bagaimana memberdayakan tenun ini bisa berjalan dengan baik dan mengenai hal-hal penenunan tersebut dan Alhamdulillah ada sarana yang di buatkan dari Kabupaten dan Provinsi”(AM,4 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan dapat di kemukakan bahwa Kepala Desa Karama telah mempersiapkan sarana yang dibutuhkan masyarakat untuk menenun agar lebih memudahkan masyarakat untuk menenun dan pemerintah juga menyiapkan alat tenun agar pekerjaan para penenun dapat lebih cepat di selesaikan.

Lanjut hasil wawancara dengan masyarakat penenun mengatakan bahwa :

Wawancara dengan ketua kelompok tenun mengatakan bahwa:

“Peran pemerintah dalam menyiapkan tempat dan alat menenun cukup baik, karena kami juga terbantu dengan adanya kelompok-kelompok tenun dalam hal memberdayakan kain tenun sutera di Desa Karama”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua kelompok tenun dapat dikatakan bahwa peran pemerintah dalam menyiapkan tempat dan alat tenun cukup baik karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya alat yang di berikan oleh pemerintah karena lebih memudahkan masyarakat untuk mengejar target ketika ada pesanan dari kantor-kantor.

2. Tahap Assesment

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Karama mengatakan bahwa :

“Yah, Penilaian dari masyarakat sungguh luar biasa terkait adanya tenun ini, bagaimana pun juga kepada masyarakat ya, termasuk juga pada pemberdayannya. Nah, di samping itu pendapatan dari masyarakat akan meningkat”(AM,3 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Karama dapat di kemukakan bahwa penilaian dari masyarakat sangat baik dalam proses pemberdayaan karena di Desa Karama mayoritas masyarakatnya adalah pembuat kain tenun sutera di samping itu, pendapatan dari masyarakat dapat meningkat.

Wawancara dengan ketua kelompok tenun, mengatakan bahwa:

“Masalah yang dialami untuk para pengrajin sarung tenun sutera mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten

Polewali Mandar masih kurangnya bahan baku yang di sediakan oleh pemerintah setempat, jadi masyarakat untuk penambahan bahan baku untuk menenun kain sutera mereka menggunakan dana pribadi dan apa bila bahan tersebut ada kekeurangan atau menambah beberapa lembar sarung tenun maka otomatis bahan yang disediakan oleh pemerintah masih kurang. Masalah yang di hadapi masih kurangnya fasilitas alat-alat tenun untuk di anggarkan untuk masyarakat setempat karena tidak seimbang dengan alat dengan sumber daya manusia yang ada desa karama sebagai pengrajin kain tenun sutera. Jadi kami berharap mudah-mudahan pemerintah setempat agar menganggarkan alat tenun”.

Berdasarkan wawancara dengan ketua kelompok tenun dapat di kemukakan bahwa masalah yang dihadapi pengrajin sarung tenun sutera di Desa Karama masih kurangnya bahan baku yang di sediakan oleh pemerintah Desa jadi terkadang masyarakat menggunakan dana pribadi untuk menenun dan apabila bahan tersebut ada kekurangan atau penambahan beberapa lembar dari pemesan sarung sutera maka otomatis bahan yang di sediakan oleh pemerintah kurang dan masalah yang di hadapi masih kurangnya alat-alat tenun untuk di anggarkan ke pada masyarakat pengrajin.

Lanjut wawancara dengan masyarakat penenun, mengatakan bahwa:

“Di Desa kita ini ada beberapa kelompok tenun, adapun perkembangan-perkembangan selanjutnya di lakukan studi banding di daerah luar”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penenun dapat dikemukakan bahwa di Desa Karama terdapat beberapa kelompok tenun adapun perkembangan selanjutnya akan dilakukan studi banding

di daerah luar agar perkembangan di Desa karama dapat lebih baik dan dapat mengikuti perkembangan.

Wawancara dengan masyarakat penenun, mengatakan bahwa :

“Yah, sangat mendukung sekali karena sarung sutera ini turun temurun, meskipun ada sebagian masyarakat mencari pekerjaan lain” (M.4 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Karama dapat dikemukakan bahwa masyarakat setempat sangat mendukung adanya sarung tenun, meski sebagian masyarakat mencari pekerjaan lain selagi menunggu pemesan kain tenun sutera.

Wawancara dengan masyarakat tenun, mengatakan bahwa :

“Mengenai sumber daya manusia yang ada di desa karama yang menekuni pembuatan kain tenun mandar masih sangat mendukung karena mayoritas istri para nelayan yang ada di pepesisir pantai desa karama pekerjaannya hanya pembuat kain tenun sutera dan anak-anaknya yang perempuan yang sudah beranjak dewasa sudah di ajarkan bagaimana tata cara pembuatan kain tenun sutera sehingga keberlangsungan sumber daya manusia tetap ada da untuk menjaga kearifan lokal desa dan untuk melestarikan sarung sutera mandar sebagai simbol yang ada di desa karama dan harapan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah setempat supaya dengan adanya bantuan alat yang sudah modern agar bisa disinkronkan dengan alat tradisional dari penenun terdahulu”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penenun dapat di kemukakan bahwa sumber daya manusia yang ada di Desa Karama yang menekuni pembuatan kain tenun masih sangat mendukung karena mayoritas istri para nelayan pekerjaannya hanya membuat kain tenun dan anak-anak mereka yang sudah beranjak dewasa diajarkan

bagaimana cara membuat kain tenun sutera sehingga budaya masyarakat di desa karama tentang pembuatan kain tenun sutera tetap berjalan.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program Atau Kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Karama mengatakan bahwa :

“Yah, peran kami di sini dalam pemberdayaan paling tidak kalau memang ada bantuan-bantuan kita berikan kepada kelompok-kelompok”(AM,3 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Karama dapat di kemukakan bahwa jika memang ada bantuan pemerintah Desa berikan kepada kelompok tenun.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa :

Jika ada bantuan dalam proses pemberdayaan kita berikan kepada masyarakat.

Lanjut wawancara dengan ketua kelompok penenun, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya rencana kami sangat banyak sekali karena yang menjadi kendala kami sekarang ini kurangnya pemasaran, adapun sebagian penenun di sini, yah Alhamdulillah sudah keluar daerah untuk mempromosikan kain tenun kita ini dalam acara pameran-pameran” (NS,4 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tenun dapat di kemukakan bahwa perencanaan dari pemerintah ada beberapa tetapi yang menjadi kendala keurangnya pemasaran namun ada juga

penenun yang keluar daerah untuk mempromosikan kain tenun di dalam acara pameran.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa :

Di Desa Karama kurangnya pemasaran dan adapun masyarakat telah melakukan pameran di luar daerah.

Wawancara dengan masyarakat penenun, mengatakan bahwa :

“Jadi harapan masyarakat agar masalah yang dialami oleh kelompok penenun supaya pemerintah setempat/fasilitator agar melakukan evaluasi perkembangan penenun kelompok yang ada di desa karama agar pemerintah mengetahui apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh kelompok penenun dan pemberdayaan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah setempat atau pemerintah tingkat atas supaya masyarakat diberikan dukungan untuk pengembangan sarung tenun dan masyarakat memintah kepada pemerintah untuk mencari pemasaran di luar daerah supaya sarung yang sudah jadi atau sudah di produksi berjalan lancar sesuai kebutuhan dengan banyaknya produktifitas”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat peneun dapat dikemukakan bahwa yang menjadi harapan masyarakat agar masalah yang di alami oleh kelompok tenun agar pemerintah setempat atau fasilitator agar melakukan evaluasi perkembangan penenun yang ada di Desa Karama yang nantinya pemerintah akan mengetahui apa yang menjadi kendala masyarakat penenun dan juga harapan masyarakat agar pemerintah melakukan pemasaran di luar daerah supaya sarung yang telah di produksi bisa terjual.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa :

Harapam masyarakat agar masalah yang dihadapi oleh kelompok tenun di deasa karama agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi kendala supaya pemerintah memberikan dukungan untuk para penenun untuk melakukan pemasaran di luar daerah.

Wawancara dengan masyarakat penenun, mengatakan bahwa:

“Jadi solusi kami sebagai masyarakat untuk masalah ini supaya pemerintah tiap tahun menganggarkan penambahan bahan baku sarung tenun dan alat-alat yang dipakai untuk menenun semoga pemerintah setempat dan pemerintah dari provinsi bisa membudidayakan ulat sutera khususnya di desa karama supaya masyarakat tidak terkendala lagi di bahan baku. Ketika masyarakat sudah bisa membudidayakan ulat sutera tersebut dengan adanya nanti budidaya maka penghasilan masyarakat akan meningkat ketika adanya budidaya karena bahan yang dibeli dari luar harganya tidak akan sama lagi ketika kita sudah bisa mengelola bahan sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penenun dapat di kemukakan bahwa solusi dari masyarakat untuk masalah perencanaan agar pemerintah tiap tahun menganggrkan penambahan bahan baku dalam pembuatan sarun tenun dan alat yang di gunakan untuk menenenun dan pemerintah juga dapat melakukan program dalam hal membudidayakan ulat sutera khususnya di Desa Karama agar masyarakat tidak terkendala lagi di bahan baku dalam pembuatan sarung sutera karena abahan yang di beli dari luar dan ketika masyarakat dapat mengelola dengan sendiri itu harganya akan berbeda.

Gambaran Alur Penyusunan Perencanaan

Pemerintah desa melakukan kegiatan musyawarah desa mengundang beberapa unsur masyarakat mulai dari toko adat, toko agama, toko pendidikan, toko pemuda, toko kelompok, kelompok nelayan, kelompok perempuan untuk merumuskan pembangunan yang ada di RP JEMDES untuk di susun dan di masukkan ke dalam RKP Desa setelah itu melakukan musyawarah desa pemerintah desa melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa tahun anggaran tersebut untuk menyepakati program-program kerja yang akan di bangun atau dilaksanakan pada tahun tersebut dan setelah musyawarah maka disusunlah masuk di APB Desa setelah itu, kepala desa duduk bersama BPD pemerintah desa untuk menyusun APBS anggaran pendapatan Desa.

Alur proses perencanaan :

- a. Pembuatan RKP Rancangan Kerja Pemerintah Desa
 - b. Penyusunan APB Desa Anggaran Pendapatan Belanja Desa
 - c. Pembuatan PERDES Peraturan Pemerintah Desa
4. Tahap Formulasi Aksi

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Karama, mengatakan bahwa :

“Yah, Peran kami dalam pemberdayaan bagaimana agar perekonomian masyarakat meningkat produktifitas juga” (AM,3 Maret 2021).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa :

Peran pemerintah dalam pemberdayaan yaitu bagaimana agar perekonomian masyarakat dapat meningkat.

Lanjut wawancara dengan ketua kelompok penenun, mengatakan bahwa:

“Yah, Alhamdulillah lancar-lancar saja pemasaran dari luar” (NS, 4 Maret 2021).

Wawancara dengan masyarakat penenun mengatakan bahwa :

“Pemerintah setempat dalam hal ini sebagai fasilitator biasanya membantu masyarakat atau pun kelompok penenun di dalam perencanaan pembuatan proposal yang akan disodorkan kepada instansi yang berkaitan mengenai pemberdayaan yang bernaungi di bidang pemberdayaan supaya ketika ada bantuan mengenai ruang lingkup pembuatan sarung tenun atau pelatihan instransi tersebut bisa memprioritaskan desa yang memasukkan proposal sebagai bahan pertimbangan di dalam perencanaan masyarakat desa karama dalam pembuatan sarung tenun”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penenun dapat di kemukakan bahwa pemerintah dalam hal sebagai fasilitator membantu masyarakat dalam hal pembuatan proposal yang akan di berikan kepada instansi yang terkait dalam hal pemberdayaan agar bantuan yang merupakan ruang lingkup pembuatan sarung tenun atau pelatihan bisa memprioritaskan Desa yang mengajukan proposal.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa: Pemerintah membantu masyarakat dalam hal pembuatan proposal yang akan di sodorkan kepada instansi yang berkaitan mengenai pemberdayaan dan agar bisa lebih memprioritaskan masyarakat yang mengajukan proposal.

Daftar Program Kerja Pemerintah

1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Peningkatan Kapasitas BPD & Anggotanya

3. Pelatihan PKK
 4. Operasional + Belanja Modal PKK
 5. Pengadaan Mesin Katinting
 6. Pengadaan Alat Tenun dan Perlengkapan Bahan Menenun
 7. Pengadaan Alat dan Bahan Untuk Tenun
5. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Karama mengatakan bahwa :

“Yah, proses pelaksanaannya itu paling tidak ada bahan-bahan dasarnya dulu yang kemudian dikelola terlebih dahulu menjadi benang dan membrikan warna baru di olah dengan baik, karena kita masih menggunakan peralatan tradisional”(AM,3 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Karama dapat di kemukakan bahwa paling tidak ada bahan-bahan dasar yang kemudiaan di kelola dengan baik dan proses pembuatannya menggunakan peralatan tradisional.

Dari hasil wawawancara diatas dapat disimpulkan bahwa :

Dalam proses produksi masih menggunakan peralatan tradisional dari bahan dasar yang telah tersedia.

Wawancara dengan ketua kelompok tenun, mengatakan bahwa:

“Jadi pengimplementasian yang ada dilapangan tidak sesuai maka masyarakat dan fasilitator akan musyawarah kembali mengenai perencanaan awal untuk melaksanakan kegiatan yang sudah terencana sesuai dengan perencanaan yang ada dilapangan supaya kegiatan yang di jadwalkan bisa berjalan tamphal mempermasalahkan apa yang menjadi kekurangan dan kendala pada saat kegiatan akan di mulai agar nantinya kegaiatan sudah berjalan masyarakat dan fasilitator akan mengevaluasi kegiatan

yang akan di laksanakan agar selanjutnya berjalan sesuai dengan perencanaan awal”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tenun dapat di kemukakan bahwa jika pengipemenasian di lapangan berbeda masyarakat dan pemerintah melakukan musyawarah kembali mengenai perencanaan awal untuk melaksanakan kegiatan yang sudah terencana sesuai perencanaan di lapangan agar kegiatan yang di jadwalkan dapat berjalan sesuai rencana awal tanpa adanya hambatan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa:

Masyarakat akan musyawarah kembali mengenai perencanaan yang akan dilakukan agar perencanaan yang dari awal tetap berjalan sesuai keinginan tanpa adanya hambatan.

6. Tahap Evaluasi

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Karama, mengatakan bahwa :

“Yah itu tadi yang saya katakan kurangnya pemasaran karena kenapa kain sutera ini boleh di kata rendahnya peminat kain tenun sutera. Jadi kadang jika tidak ada pesaran, masyarakat memilih mencari pekerjaan lain untuk sementara namun adapun pesanan nantikan biasanya ada dari kantor-kantor”(AM,3 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dapat di kemukakan bahwa kurangnya pemasaran karena sebenarnya kain tenun sutera kurang peminat terkadang tidak ada yang memesan ke pada masyarakat.

Dari hasil wawaancara dapat disimpulkan bahwa :

Kurangnya pemasaran karena rendahnya peminat kain tenun sutera jadi terkadang masyarakat memilih mencari pekerjaan lain disamping menunggu adanya pesanan kain tenun.

Lanjut wawancara dengan ketua kelompok penenun, mengatakan bahwa:

“Yah, kami sudah evaluasi dengan banyaknya kelompok-kelompok di Desa ini. Kadang juga ada dari perindustrian dan instansi-instansi lain datang ke sini melakukan evaluasi tentang produksi kain tenun”(NS, 4 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok dapat di kemukakan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi dengan kelompok-kelompok tenun dan tidak jarang perindustrian dan instansi juga ikut melakukan evaluasi tentang produksi kain tenun.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa :

Telah dilakukan evaluasi dengan kelompok tenun dan juga dari pihak perindustrian dan instansi-instansi datang untuk melakukan evaluasi tentang produksi kain tenun.

Wawancara dengan masyarakat penenun, mengatakan bahwa :

“Yah, pertimbangan kami dalam masalah kain tenun yang kami harapkan juga dari pihak-pihak lain untuk mendukung kain sutera ini supaya bisa terekspos keluar” (N, 5 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat tenun dapat di kemukakan bahwa perimbangan bagi masyarakat agar pihak-pihak lain mendukung adanya kain tenun sutera agar dapat terekspos keluar.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa :

Harapan dari masyarakat adanya dukungan dari pihak lain agar kain tenun sutera dapat di ekspos keluar.

Wawancara dengan masyarakat tenun, mengaakan bahwa:

“Setelah selesai kegiatan kami selaku masyarakat yang ikut dalam pemberdayaan tersebut dan bersama dengan fasilitator kami melakukan evaluasi antara lain :1) mengenai progres kegiatan sampai di mana kemajuan masyarakat yang ikut dalam pelatihan tersebut apakah sudah ada peningkatan berbagai macam sarung sutera mandar, 2) mengenai peningkatan produktifitas, mengenai peningkatan produktifitas apakah masyarakat yang melakukan pelatihan apakah sudah ada peningkatan produktifitas yang tadinya 10 lembar bisa menjadi 15 lembar, 3) mengenai efisiensi waktu apakah masyarakat yang sudah ikut dalam pelatihan atau pemberdayaan waktu yang di gunakan dalam pembuatan kain tenun sutera apakah di tempuh dalam pembuatan kain tenun sudah mengurangi sedikit waktu yang tadinya 2 minggu sekarang kurang lebih 1 minggu”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penenun dapat dikemukakan bahwa setelah selesai kegiatan masyarakat akan ikut dalam pemberdayaan bersama dengan fasilitator yang pertama mengenai progres kegiatan sampai dimana kemajuan masyarakat yang ikut dalam pelatihan apakah sudah ada peningkatan dari masyarakat, kedua mengenai peningkatan produktifitas bagaimana agar masyarakat yang telah melakukan pelatihan apakah telah mengalami peningkatan dalam hal menenun kain sutera, ketiga mengenai efisiensi

waktu apakah masyarakat yang telah ikut dalam pelatihan dapat mengurangi sedikit keterlambatan dalam hal menenun kain yang tadinya 2 minggu menjadi kurang lebih 1 minggu.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa:

Masyarakat yang ikut dalam pemberdayaan bersama dengan fasilitator melakukan evaluasi mengenai progres kegiatan, mengenai peningkatan produktifitas dan mengenai efisiensi waktu. Masyarakat yang sudah ikut pelatihan atau pemberdayaan waktu pembuatan cukup cepat dari yang biasanya yang memakan waktu 2 minggu dan menjadi sekitar 1 minggu.

Gambaran Evaluasi Program/ Kegiatan Pembangunan

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat Desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa, melainkan juga disebabkan permasalahan eksternal baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah di lakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikan secara partisipatif dalam penyusunan RKP Desa tahun 2021 didasarkan pada 3 (tiga) analisa sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan

Evaluasi tahun pembangunan sebelumnya dilaksanakan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan inplemetasi pelaksanaan tahun

2020 dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan permasalahan sebagai Berikut :

2. Penggunaan Anggaran

Diantara beberapa usulan jenis kegiatan pembangunan di Desa Karama pada tahun sebelumnya hanya dapat terealisasi sebagian dari usulan jenis kegiatan pembangunan di Desa yang terhambat dengan adanya permasalahan internal di Desa.

3. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

- a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Pengaktifan RT/RW
 - b. Pengadaan Umbul-Umbul
 - c. Pembangunan Dapur Kantor Desa

7. Tahap Terminasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Karama, mengatakan bahwa :

“Kami di sini saling membutuhkan jadi kami tidak mengakhiri kerjasama antara pemerintah dan masyarakat penenun” (AM,3 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tenun dapat di kemukakan bahwa pemerintah dan masyarakat saling membutuhkan, jadi tidak ada pemutusan kerja sama.

Wawancara dengan ketua kelompok penenun, mengatakan bahwa:

“Jadi kami dari kelompok pembuat tenun sutera akan meminta kepada pihak pemerintah dan penyandang dana apabila kami dari kelompok sudah bisa mandiri dan sudah produktifitas meningkat dan pemasaran sudah ada kami akan memutuskan kerja sama dengan pihak tersebut

supaya kami dari kelompok tidak ketergantungan lagi dengan bantuan-bantuan yang di berikan pemerintah ketika kami sudah mandiri dan bisa lagi membangun sebuah pemberdayaan mayarakat yang baru bukan hanya di ruang lingkup pembuatan sarung tenun tetapi masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa di bantu oleh pemerintah dan penyangang dana tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Karama dapat di kemukakan bahwa masyarakat pembuat tenun sutera akan meminta kepada pemerintah agar dan penandang dana apabila masyarakat sudah bisa mandiri dan produktifitas dan pemasaran agar masyarakat tidak ketergantungan lagi ketika sudah bisa membangun sebuah pemberdayaan masyarakat yang baru.

Wawancara dengan masyarakat penenun

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penenun dapat di kemukakan bahwa

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa :

Masyarakat berharap dapat mandiri agar tidak ketergantungan lagi dengan pemerintah.

II. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Proses Pemberdayaan Kain Tenun Sutera

a. Faktor Pendukung

Salah satu faktor yang menjadi pendukung dari upaya pemberdayaan adalah komitmen pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Tenun Sutera Mandar. Pemerintah memberikan fasilitas dalam mendukung produk unggulan daerah agar

mempunyai arti dimata masyarakat dan terus berkembang. Produk unggulan daerah merupakan harta yang dimiliki suatu daerah. Salah satu bentuk dukungannya yaitu melalui kegiatan pameran produk daerah.

Selain dukungan dari pemerintah desa Karama, masyarakat khususnya masyarakat penenun pada tenun Desa Karama. Masyarakat memiliki antusias dalam mempertahankan dan memajukan kerajinan Tenun Sutera Mandar. Dengan adanya keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk berkembang maka dapat melancarkan upaya pemberdayaan.

b. Faktor Penghambat

Kualitas atau kemampuan sumber daya manusia sendiri juga agar menjadi faktor pengahambat dari upaya pemberdayaan terhadap pelaku usaha Tenun Sutera Mandar. Tidak semua penenun atau pemilik usaha kerajinan yang mampu berkembang dan bertahan seiring dengan perubahan zaman serta mampu menerima perubahan dari upaya pemberdayaan. Ada beberapa pemilik usaha yang malah menghentikan usaha kerajinan usaha kerajinan tenun beberapa penyebabnya salah satunya karena kurangnya peminat atau pemesan kain tenun sutera di Desa Karama.

C. Pembahasan

1. Tahap Persiapan

Petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksud untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa telah terdapat tempat yang disiapkan oleh pemerintah untuk pemberdayaan produksi kain tenun di Desa Karama ini dan telah disiapkan alat menenun untuk kelompok penenun.

2. Tahap assesment,

Tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penilaian dari masyarakat terkait pemberdayaan kain tenun di Desa Karama di samping dapat meningkatkan pendapatan para pengrajin kain tenun sutera. Pemerintah juga mendukung adanya pemberdayaan di Desa ini selain karena kain tenun sutera adalah tradisi turun temurun ciri khas masyarakat Mandar yang harus tetap di lestarikan.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternative program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam proses penyaluran bantuan yang di berikan oleh pemerintah provinsi untuk kelompok-kelompok tenun. Namun karena terjadinya pandemik kuranya bantuan yang didapatkan untuk proses pemberdayaan kain tenun karena sebagian bantuan di alihkan untuk membantu masyarakat.

4. Tahap formulasi rencana aksi

Pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditunjukkan kepada pihak peyandang dana.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah disini bagaimana agar perekonomian masyarakat meningkat terutama dalam hal pemberdayaan kain tenun sutera.

5. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan

fasilitator. Perlu menjamin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang suatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng saat dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan yang dilakukan paling tidak ada bahan-bahan dasar untuk membuat kain tenun sutera yang dioleh dengan baik oleh para pengrajin yang masih menggunakan peralatan tradisional yang mereka bikin sendiri..

6. Tahap evaluasi

Tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan Evaluasi dilakukan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat terkendala di proses pemasaran karena peminat kain tenun tradisional mengalami penurunan kurangnya peminat kain tenun sutera sehingga seringkali masyarakat mencari pekerjaan lain seperti nelayan selagi menunggu adanya pesaran dari kantor-kantor atau sebagainya.

Harapan dari masyarakat sendiri agar masyarakat luar membantu proses pemberdayaan kain tenun di Desa karama ini agar dapat terekspos keluar.

7. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa di Desa Karama ini antara pemerintah dan masyarakat saling membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat penenun. Pemerintah bertugas menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan masyarakat yang mengelolanya menjadi kain tenun sutera.

Pemintalan Benang Sutera

Meskipun di pasar-pasar tradisional Mandar khususnya di Tinambung, Limboro dan Balannipa sudah dapat dibeli benang sutera yang sudah jadi bahkan sudah diberi warna dan siap di tenun, namun para penenun juga masih banyak yang memelihara ulat sutera dan memintal sendiri dengan kualitas yang lebih baik dan lebih murah.

Tempat pemeliharaan ulat sutera ada di Desa Samasundu Kecamatan Limboro yang letaknya berada di daerah pedalaman dan sedikit berbukit. Tempat ini orang menanam pohon murbei untuk makanan ulat sutera. Di Kecamatan Balannipa juga terdapat pemeliharaan ulat sutera di dusun Pallis Desa Mosso.

Ulat sutera setelah dipelihara selama 20 hari, kepompong yang telah dipanen sebelum di pintal biasanya di jemur untuk menghindari kerusakan.

Kepompong yang telah kering dipintal. Sistem pemntalan masih sederhana seperti yang dikerjakan di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro.

Benang sebelum di pintal direndam dahulu, lalu dimasukkan ke dalam air panas sambil ditekan-tekan ke dalam, untuk itu volume air dikurangi sehingga kokon yang tenggelam 75%.

Kemudian kokon (kempong) di bawah kealat pintal. Untuk mwncari ujung serat dapat digunakan sikat atau kuas kecil. Serat kemudian dimasukkan ke penjaringan, kemudian ke peuncur selanjutnya ke haspel, tempat penggulungan benang sutera. Setelah diangin-angin lalu dimasukkan ke dalam plastik dan siap untuk ditenun atau dipasarkan.

Pewarnaan Benang Sutera

Dalam proses pewamaan sutra, bahan-bahannya adalah: jeruk nipis, nila untuk pewama hitam, pinang untuk pewarna merah, dan binatang sejenis kumbang kalo'on. Adapun cara pengolahannya adalah : mula-mula air dipanaskan hingga mendidih, mattanaq wai, lalu benang yang masih dalam gelondongan dimasukkan ke dalam air mendidih hingga beberapa saat. Kemudian bahan pewarna dimasukkan hingga larut dengan wama. Lalu diangkat dipindahkan ke air dingin, ditappasari. Kemudian benang di angin-angin hingga kering, diattareng. Benang yang kering dimasukkan ke dalam rowing dan kemudian dimasukkan ke dalam galendrong (penggulung benang) Menenun.

Corak Tenunan

Ciri khas tenun kain sutera Mandarbadalah bercorak (suraq) berkotak-kotak yang dihasilkan dengan silangan benang lungsi yang vertikal yang bentuknya seperti pagar dengan benang pakan yang horizontal yang saling memotong. Kedua jenis benang ini sudah disiapkan corak warnanya masing-masing. Masing-masing kotak memiliki luas kotak yang berbeda-beda.

Variasi bentuk kotak

- Antara lain seperti pada *suraq salaak*, luas kotak $1,5 \times 1,5$ cm atau *suraq maraqdia* berukuran $2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, disamping itu ada sureq yang bentuk kotaknya kecil sampai ukuran milimeter.
- *Sureq pangulu*, dalam satu kotak saling memotong antara garis vertikal dan horizontal terdapat 15 kotak diisi dengan 9 kotak yang lebih halus, garis warna, antara lain coklat muda, merah maron dan krem dan warna dasarnya hitam.
- *Sureq Puang Lembang* dan *Puang Lomboro* mempunyai tingkat kerapatan garis yang sangat rapat.

Pemberian Nama Sureq

1. Pemberian nama dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya Mandar diantaranya pemberian nama sesuai dengan gelar-gelar kebangsawanan pada sistem pemerintahan kerajaan Mandar, seperti gelar bangsawan *Sureq Pangulu* gelar salah satu bagsawan adat, *puang lebang*, salah satu anggota adat dan *Maraqdia*, bangsawan.

Sureq Pangulu

Sureq tertua dan klasik, warna coklat tua, hitam atau ungu. Garis berwarna putih atau coklat muda kemerahan. Dipakai oleh bangsawan tinggi di Mandar atau pengulu adat dipakau dalam pertemuan pada dewan adat.

Sureq Puang Lembang

Dipakai oleh seorang bangsawan, warna khas merah tua , coklat, ungu dan hitam

Sureq Puang Limboro

Dipakai oleh salah satu anggota dewan adat.

Sureq Maraquadia

Dipakai oleh bangsawan tinggi, maraquadia. Corak empat kotak yang diisi garis garis vertikal dan horizontal saling berpotongan, warna dasar gelap hitam.

Sureq parare

Parare bearti merah, dipakai oleh kaun wanita bangsawan ketika menghadiri perkawinan dan acara resmi pelantikan raja, dan lainnya.

Sureq Panja

Penja adalah nama sejenis ikan kecil yang biasa juga disebut ikan seribu. Motifnya kotak kecil dan banyak. Warna kecoklatan atau hitam. Namun perkembangan kemudian ditambah hiasan benang perak. Corak ini banyak dipergunakan oleh masyarakat pantai atau pesisir.

Sureq Tembang

Tembang adalah nama sejenis ikan, corak ini banyak dipergunakan oleh masyarakat nelayan dan keluarga.

Sureq Bandera

Sureq yang biasa digunakan oleh kalangan cendekiawan

Sureq Beruq-beruq

Beru-beru adalah melati yang harum, corak ini bercirikan kain dengan latar gelap dan dengan motif terang dari benang putih. Dipakai oleh pasangan suami istri yang baru menikah.

Sureq Bantu Darima

Batu darima adalah buah delima dengan bijinya yang bening kemerah-merahan. Corak ini dipakai gadis remaja dengan baju *pokkoq*.

Sureq Ganttun Layar

Ganttun layar berarti layar perahu yang tergantung. Garis yang digunakan dalam corak ini lebih tebal dan bergaris kecil. Sureq ini dipakai oleh pelaut dan kaum nelayan juga keluarganya dalam acara resmi.

Sureq Lowang

Corak ini sesuai dengan motif kotak yang besar dan dengan perpaduan warna yang mencolok. Warnanya merah, hijau sebagai pertanda keceriaan dan kesuburan tanah Mandar.

Sureq Maranning

Maranning artinya kecil, motif kotak-kotak kecil dengan garis yang tipis saling berpotongan, sehingga kotak dalam sarung ini banyak.

2. Jenis tenunan yang diberi hiasan benang perak disebut sureq Salaka dan juga sering disebut sureq Paqbiara, sebab pada nama kejayaan kerajaan yang menggunakan kain dengan benang perak ini adalah bertugas sebagai hakim atau paqbiara. Sureq salaka dikembangkan dengan warna-warna corak, hijau, merah muda, jingga, biru terang, sehingga dapat dipakai oleh putra putri bangsawan, maraqdia Tobaine dan puang Tobaine.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tenun tradisional sutera masyarakat Mandar telah berlangsung cukup lama dan telah mengalami pasang surutnya sesuai dengan perkembangan zaman. Hanya saat ini tenunan tradisional tersebut masih dapat ditemukan dalam masyarakat. Dalam perjalanan waktu tenun tradisional sutera mengalami perkembangan mengikuti zaman.

Deskripsi fokus penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan, yaitu petugas dan penyiapan lapangan untuk para penenun dan terdapat kelompok penenun untuk menunjang pemberdayaan kain tenun sutera. Sedangkan penyiapan lapangan berada di Desa Karama di sana telah di sediakan tempat dan alat untuk menenun bagi masyarakat.
2. Tahap assesment, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Karama dalam hal pemberdayaan karena kurangnya peminat kain tenun sutera dan kadang mereka hanya menunggu pesanan dari kantor-kantor dan dalam hal sumber daya untuk meneun di Desa Karama masih mengambil dari Desa lain.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahapan ini rencana yang telah dibuat untuk memberdayakan kain tenun sutera di Desa Karama rencana yang telah dibuat oleh pemerintah Desa karama

terkendala dengan kurangnya pemasaran dan terkait sekarang pandemik Corona yang aktivitas masyarakat sangat terbatas dan pengunjung dari luar juga kurang.

4. Tahap formulasi rencana aksi, pada tahap ini ketua kelompok penun melakukan promosi keluar dan terkadang mengikuti berbagai pameran-pameran di luar daerah.
5. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk proses pelaksanaan di mana bahan-bahan yang didapatkan dari Desa lain yang di sediakan dari pemerintah dan masyarakat yang mengelolanya menjadi sarung tenun sutera.
6. Tahap evaluasi, tahap ini pemerintah Desa dan ketua kelompok tenun melakukan proses pengawasan kepada masyarakat kelompok dalam proses meneun kain dan terkadang pemerintah provinsi juga datang untuk melakukan evaluasi di Desa Karama kepada kelompok masyarakat tenun.
7. Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk proses produksi kain tenun sutera. Jadi tidak ada pemutusan kerja sama yang akan dilakukan.

B. Saran

Upaya agar peran pemerintah dalam pemberdayaan produksi kain tenun sutera di Desa Karama dapat terealisasi dengan baik, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Desa Karama agar lebih giat melakukan sosialisasi agar target yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai dengan maksimal dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk membantu proses sosialisasi, agar tidak hanya berpatok pada struktur yang ada saja untuk melakukan proses sosialisasi agar masyarakat dapat lebih paham pentingnya pemberdayaan produksi kain tenun sutera.
2. Bagi masyarakat, agar dapat menjadi proaktif untuk membantu pemerintah dalam proses pemberdayaan agar dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus,Kurniawan Wahyu.2010.*Studi Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Batik Di Kota Surakarta*.Surakarta.Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Bahrum,Shaifuddin.2009.*Tenunan Tradisional Mandar di Sulawesi Barat*.Jakarta:Direktorat Jendral Nilai Budaya.Seni dan Film
- Hartawansya,A.2019.*Peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dalam Meelola Produk Kerajinan Sutera di Kabupaten Soppeng*.Makassar.Universitas Muhammadiyah Makassar
- Sumala,Tenri.2017.*Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Tenun Tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo*.Makassar.Universitas Muhammadiyah Makassar
- Hasan,Saifullah.2016.*Peran Pemerintah Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Psar Tradisional di Kota Makassar*.Universitas Hasanuddin
- Gunawan,Sumodinigrat.2003.*Pengembangan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*.Jakarta.PT.Bina Parawira
- Irawan,Candra.2011.*Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*.
- Muslim,Aziz.2012.*Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*.Yogyakarta.Samudera Biru
- Rukminto,Isbandi.2008.*Intervensi Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*.Jakarta.PT.Grafindo Persada
- Prastika,Hamami.2016.*Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan KebijakanKulit diKabupaten Magetan*.UniversitasAirlaga
- Kusumadara,Afifah.2011.*Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia*.
- Soekanto,Soerjono.2010.*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.PT.Raja Grafindo.Jakarta
- Sutedi,Adrian.2009.*Hak Atas Kekayaan Intelektual*.Sinar Grafika:Jakarta

Agung,Gusti Wisudawan.2010.*Perlindungan Hak Cipta Kain Tenun Tradisional Khas Lombok Menurut Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 Di Kabupaten lombok Tengah*.Volume 4 No.1

Ariani,Dwi Nenny.2016.*Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Kain Tapis dan Siger Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Internasional*.Law Reform,Volume.12,No.1 P-ISSN:1858-4810 E-ISSN:2580-8508

Citrawan, Harison.dkk.,2019.*Efektivitas Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil*.Mimbar Hukum.Volume 31 No.2. Halaman 174-190

Nurhidayanti.2017.*Perlindungan Merek Terkenal Menurut UU No.15 Tahun 2001 (Kasus Pierre Carlin Melawan Alexander Satriyo Wibowo)*.Jurnal Administrasi Kantor.Volume 5 No.1 P-ISSN:2337-6694 E-ISSN:2527-9769.

Rohmawati,Alfi.dkk.2015.*Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengrajin Tenun Ikat Bandar Kidul Sebagai Produk Unggul Daerah*.Jurnal Administrasi Publik.Volume 3 No.11.Halaman 1827-1831



RIWAYAT HIDUP



ST. Nuraisyah, lahir pada tanggal 21 Mei 1997 tepatnya di Buttu Dekka dan sekarang sekarang telah menetap di kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Anak ketiga dari 5 bersaudara dari buah kasih pasangan bapak M. Nurdin Kumar dan Ibu Mina Saal. Pada tahun penulis menepuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 024 Pelitakan, dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 1 Mamasa dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di SMA Negeri 1 Mamasa, dan tamat pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar mengambil Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik strata 1 (S1) kemudian penulis menyelesaikan kuliah S1 pada tahun 2021, dan berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah didepan penguji berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengrajin kain Tenun di Desa Karama Kecamatan Tinambung kabupaten Polewali Mandar” dan mendapatkan gelar S.Sos